

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
( K U A )  
KABUPATEN PATI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
TAHUN 2021**



# **PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PATI**

**Nomor : 13/ VIII / NK / 2021**

**Nomor : 5/ VIII / NK / 2021**

**Tanggal : 9 Agustus 2021**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PATI**

**Nomor : 13 / VIII / NK / 2021**

**Nomor : 5 / VIII / NK / 2021**

**Tanggal : 9 Agustus 2021**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.**  
Jabatan : Bupati Pati  
Alamat Kantor : Jalan Tombonegoro Nomor 1 Pati

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati

2. a. Nama : **H. ALI BADRUDIN, SE**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pati  
Alamat Kantor : Jalan Dr. Wahidin Nomor 2 A Pati
- b. Nama : **H. JONI KURNIANTO, S.T., M.MT**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati  
Alamat Kantor : Jalan Dr. Wahidin Nomor 2 A Pati
- c. Nama : **H. HARDI**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati  
Alamat Kantor : Jalan Dr. Wahidin Nomor 2 A Pati
- d. Nama : **H. MUHAMMADUN**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati  
Alamat Kantor : Jalan Dr. Wahidin Nomor 2 A Pati

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022. Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Pati, 9 Agustus 2021

BUPATI PATI

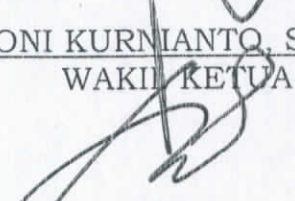
PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PATI  
Selaku,  
PIHAK KEDUA




HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

  
H. ALI BADRUDIN, SE  
KETUA

  
H. JONI KURNIANTO, ST, MMT  
WAKIL KETUA

  
H. HARDI  
WAKIL KETUA

  
H. MUHAMMADUN  
WAKIL KETUA

**RANCANGAN KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2022**

No	URAIAN	SEMULA (RANCANGAN KUA PPAS DIKIRIM)	RANCANGAN KUA PPAS SESUAI NOTA KESEPAKATAN	TAMBAH / KURANG
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.492.845.269.000	2.493.845.269.000	1.000.000.000
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	357.579.604.000	358.579.604.000	1.000.000.000
	PENDAPATAN TRANSFER	2.025.935.549.000	2.025.935.549.000	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109.330.116.000	109.330.116.000	-
2.	BELANJA DAERAH	2.569.880.269.000	2.570.880.269.000	1.000.000.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	(77.035.000.000)	(77.035.000.000)	-
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	97.000.000.000	97.000.000.000	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.965.000.000	19.965.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	77.035.000.000	77.035.000.000	-
	SILPA TAHUN BERKENAAN	-	-	-

**KETERANGAN:**

1. Terdapat penambahan pendapatan asli daerah sebesar Rp.1.000.000.000,- yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan BLUD RSUD RAA Soewondo
2. Terdapat penambahan belanja yang disebabkan meningkatnya pendapatan BLUD RSUD RAA Soewondo sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
3. Terdapat pergeseran (tambah / kurang) antar OPD yang disebabkan oleh karena perhitungan gaji ASN yang dihitung kembali berdasarkan realisasi gaji dan TPP bulan Agustus Tahun 2021.
4. Terdapat pergeseran (tambah / kurang) antar OPD penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau(DBHCHT) yang disebabkan oleh informasi dari sekretariat DBHCHT Kabupaten Pati setelah berkoordinasi dengan sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Keuangan RI.
5. Pembiayaan daerah tidak ada perubahan jumlah sebelum dan setelah pembahasan Rancangan KUA PPAS.

Pati, 0 Agustus 2021

BUPATI PATI



PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PATI

Selaku,  
PIHAK KEDUA

H. ALI BADRUDIN, SE  
KETUA

H. JONI KURNIANTO, ST, MMT  
WAKIL KETUA

H. HARDI  
WAKIL KETUA

H. MUHAMMADUN  
WAKIL KETUA